

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya, seperti yang tersirat dalam UUD 1945. Dalam rangka pencapaian hal itu, pemerintah mencanangkan program jangka panjang (PJPT), didalam masa ini masyarakat dan bangsa kita memasuki tahap pembangunan nasional yang penting, untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan yang perlu dirumuskan kedalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan yang merupakan bidang yang sangat vital. Tahap pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat indonesia, dan hal ini tidak lain akan bertumpu pada pembangunan manusia indonesia melalui pendidikannya. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, dimana diperkirakan jumlah penduduknya sekitar 210 juta jiwa. Jumlah yang demikian besar merupakan modal besar bagi pembangunan sekaligus potensi konflik yang besar pula, apabila jumlah penduduk sebesar ini dapat bedaya guna secara tepat maka akan memberikan konstribusi yang besar bagi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia melalui pembangunan, akan tetapi hal itu sulit dicapai karena rendahnya kualitas produktifitas masyarakat Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Dalam penelitian

Depnaker secara realita keberadaan angkatan Indonesia memiliki tingkat pendidikan, kualitas hidup dan skill yang rendah (85% tamatan SD, Depnaker).¹

Isu yang berkembang ini mengenai arus globalisasi yang melanda hampir diseluruh negara didunia, dan Indonesia tidak terlepas dari pada isu tersebut. Percepatan arus informasi dan teknologi yang terjadi menjelang proses perdagangan bebas menuntut kualitas sumber daya manusia yang benar-benar handal, bila perlu belajar banyak Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Thailand, bahwa investasi yang besar perlu diimbangi dengan tersedianya tenaga yang terampil. Dampak dari arus globalisasi sudah sangat teras dimana sumber daya alam sudah bukanlah penentu utama untuk modal keberhasilan pembangunan, akan tetapi ditentukan oleh kualitas penduduk yang menguasai teknologi modern dan informasi akan tergilas dan terseret oleh masyarakat teknokratis. Masyarakat teknokratis adalah gambaran masyarakat masa depan yang dapat menguasai dan mengembangkan masyarakat, penguasaan, pengembanagan dan pemanfaatan iptek dalam satu proses pendidikan.

Didalam UUD 1945 pasal 31(2) menyebutkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional. Pengertian ini diperluas dengan tidak membatasi pada pengajaran saja, melaikan juga memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia, suatu bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan

¹ Eggi Sudjana "Bayarlah upah sebelum keringatnya mengering", PPMI Jakarta, 2000,

memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dibidang pendidikan, maka dari itu pendidikan nasional mengusahakan *pertama*: pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya, *kedua*: pemberian dukungan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud edalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setipa ajaran, faham, ideologi yang bertentangan dengan pancasila.

Sistem pendidikan nasioanal adalah alat sekaligus tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pendidikan nasional dilakukan secara *semesta, menyeluruh dan terpadu*. Semesta yaitu terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku diseluruh negara. Menyeluruh yaitu mencakup semua jenjang, jenis, jalur pendidikan. Terpadu yaitu adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap rakyat sebagai warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 (1) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada setiap warga negara oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas jenis kelamin, agama, suku bangsa/ ras, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama telah berhasil mencapai tahap pendidikan universal tingkat sekolah dasar, walau pada masa itu pendidikan masih berada dalam taraf pemantapan sistemnya. Sebuah prestasi tersendiri dimana negara maju memerlukan waktu yang lebih dari 50 tahun untuk mencapai pendidikan universal 6 tahun bagi rakyatnya, akan tetapi Indonesia dapat mencapainya dalam kurun waktu 15 tahun sejak rencan dimulainya pada tahun 1969.

Pendidikan dasar dianggap penting karena beberapa hal menurut Prof. DR. H.A.R.Tilaar,M.Sc²

1. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, pendidikan dasar itu adalah dasar atau fondamen dari masyarakat yang kita bina.
2. Pendidikan dasar adalah tuntutan konstitusi pasal 31 UUD 1945 mewajibkan kepada negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran, sehingga pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia.

² Prof.DR.H.A.R Tilaar, MSc "Manajemen Pendidikan Nasional", Remaja Rosdakarya, Bandung,1992

3. Dengan lahirnya UU No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional beserta PP NO 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, maka landasan yuridis dan operasional telah tersedia sebagai langkah pertama secara mantap untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas. Dengan diundangkannya pendidikan dasar menjadi 9 tahun mewujudkan tekad bangsa kita untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.

Dengan Diundangkannya UU No 2 tahun 1989, jelaslah sudah landasan konstitusi dan pelaksanaan program pendidikan nasional, akan tetapi UU No 2 tahun 1989 tersebut masih banyak mengandung celah yang berakibat kurang maksimalnya mutu maupun hasil yang dicapai oleh dunia pendidikan kita. Hal ini terjadi khususnya pada program penyelenggaraan pendidikan ditingkat sekolah dasar.

Menurut PP No 28 tahun 1990 ternyata masih melanjutkan jiwa PP No 65 tahun 1951 khususnya pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) tentang pengelolaan pendidikan dasar, jiwa dari PP No 65 tahun 1951 yang memisahkan tanggung jawab penyelenggaraan sekolah dasar kepada Depdagri dan Depdikbud yang terkenal dengan dualisme penyelenggaraan sekolah dasar ternyata dalam PP No 28 tahun 1989 pun masih belum dibenahi tentang persoalan ini yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar.

Dalam hal ini dinas P dan K yang menjadi pengawas dari sekolah dasar juga harus menyusun kurikulum dan bertanggung jawab pula atas mutu pelajaran.

Keseriusan dinas P dan K dalam berupaya untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Kerja sama dinas P dan K dengan masyarakat akan menghasilkan keuntungan terhadap kedua belah pihak:

Manfaat bagi pendidikan :

- Memperbesar dorongan mawas diri
- Memudahkan memperbaiki pendidikan
- Memperbesar usaha meningkatkan profesi mengajar
- Konsep masyarakat tentang guru menjadi besar
- Ada koreksi dari masyarakat
- Ada dukungan moral dari masyarakat
- Memudahkan bantuan dari masyarakat
- Memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat
- Memudahkan pemanfaatan narasumber

Manfaat bagi masyarakat:

- Mengetahui akan hal persekolahan dan inovasinya
- Kebutuhan masyarakat tentang pendidikan semakin mudah diwujudkan
- Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan
- Melakukan usul terhadap lembaga pendidikan

Terlepas dari persoalan diatas, peran dari dinas itu sendiri tentulah harus bersikap profesional karena keberhasilan dari setiap organisasi tidak terlepas dari peran aktif dari staf organisasi tersebut. Mengingat bahwa pendidikan dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen dalam negeri dan departemen agama, maupun oleh

masyarakat dalam hal ini badan atau yayasan yang bersifat sosial. Peraturan pemerintah ini juga mengatur pembagian wewenang, tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar, diantara para penyelenggara pendidikan dasar yang bersangkutan. Disamping itu, peraturan pemerintah ini juga memberi peluang bagi satuan pendidikan dasar maupun bagi peneliti dan pengembang dunia pendidikan untuk melakukan penelitian dan uji coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dimasa yang akan datang akan berhadapan dengan berbagai situasi dan persoalan yang dapat mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari globalisasi dan industrialisasi. Situasi dan persoalan tersebut antara lain :

- Kehidupan masyarakat : Perubahan susunan gaya hidup, harapan serta aspirasi masyarakat dan sistem baru dalam pendidikan, politik, ekonomi, demografi dan sebagainya.
- Nilai budaya : Pergantian dan pergeseran gagasan, mutasi nilai-nilai, perubahan peran wanita, setruktur keluarga dan sebagainya.
- Lingkungan hidup : Kelengkapan sumber alam, peristiwa dan bencana alam.
- Informasi : Ruang lingkup dan kualitas informasi, konsep baru tentang berbagai sesuatu berfungsi.
- Kebudayaan : Penyebaran dan pengalihan ide, nilai dan kebiasaan dari suatu unsur kebudayaan kepada yang lainnya.

Memasuki abad ke 21 pendidikan di Indonesia berhadapan dengan berbagai alternatif masa depan yang belum menentu. Kegagalan membuat suatu proyeksi atau skenario pendidikan maka berarti kehilangan kesempatan untuk lebih maju dalam bidang pendidikan nasional tapi kita juga harus ingat akan kebutuhan yang realitis yang berkenaan dengan fasilitas dan lingkungan sekolah (gedung, sarana belajar, guru, pengelola, proses belajar serta kurikulum)

Dunia pendidikan di kabupaten Pematang masih menghadapi tiga tantangan besar, tantangan yang *pertama*; dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah tercapai. *Kedua*; untuk mengantisipasi era globalisasi dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, kualitas lulusan baik kualitas akademis, non akademis dan moral yang luhur.

Pada saat ini pendidikan di kabupaten Pematang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, yaitu :

1. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan.
2. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Masih lemahnya manajemen pendidikan.

Indikator pemerataan tenaga dan pengelola pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Pematang dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel.1

**Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah
tahun 2005**

No	Indikator	SD+MI	SLTP+MTs	SMA+MA
1	APK	104.85	73.42	30.56
	a. Laki-laki	107.31	70.29	33.05
	b. Perempuan	102.39	75.49	27.84
	c. Kota	-	-	-
	d. Desa	-	-	-
2	APM	89.64	55.02	23.19
3	Perbandingan antar jenjang	-	7.14	2.39
4	Rasio	-	-	-
	a. Siswa/ sekolah	216	455	485
	b. Siswa/ kelas	34	41	45
	c. Siswa/ guru	30	18	17
	d. Kelas/ ruang kelas	1.17	2.57	0.92
	e. Kelas/guru	0.89	1	0.37
5	Angka melanjutkan	-	63.43	50.77
6	Tingkat pelayanan sekolah	194	134	170
7	Kepadatan penduduk	154 Km ²	65 Km ²	35 Km ²

Sumber : data profil pendidikan dinas P dan K. Kab. Pematang tahun 2004-2005

Keterangan :

APK : Angka partisipasi kasar

APM : Angka partisipasi murni

APM yang tertinggi terdapat ditingkat SD+MI yaitu 89.64% dan yang terendah ditingkat SMA+MA yaitu 23.19%. berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibanding dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat ditingkat SD. Apabila sekolah antar jenjang dibandingkan maka makin tinggi sekolah makin kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SLTP berbanding tingkat SD sebesar 7.14 dan tingkat SM berbanding tingkat SLTP

sebesar 2.39. Semakin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah itu.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terdapat ditingkat SM dan MA dengan angka 216, hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SMP dan MTs yaitu 1 dan terendah terdapat pada SM dan MA yaitu 0.37. besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru ditingkat tersebut. Sebaliknya rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru ditingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SMP yaitu sebesar 2.57, hal ini berarti pada tingkat tersebut memerlukan ruang tambahan, jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio dibawah satu yang terdapat ditingkat SD dan MI serta SM dan MA.

Sejalan dengan perbandingan sekolah ditingkat SD dan SLTP yang cukup tinggi maka angka melanjutkan ditingkat SLTP juga cukup tinggi yaitu 63.43. diharapkan bila jumlah tingkat SLTP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya angka melanjutkan ke SM lebih kecil yaitu 50.77 dengan melanjutkan ke tingkat SLTP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SLTP juga rendah. Rendahnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi dapat dilihat pada

pelayanan sekolah. pada sekolah dasar tingkat pelayanan lebih besar yaitu 194 jika dibandingkan tingkat SLTP dan SM. Hal ini disebabkan karena pada SD telah terjadi pemerataan dan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun telah berhasil, sebaliknya untuk tingkat SLTP dan SM dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat SLTP sebesar 134 dan lebih besar ditingkat SM sebesar 170.

Perbedaan pencapaian ditingkat SD, SLTP dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat ditingkat SD dan terkecil ditingkat SLTP. Disamping itu, banyaknya desa tertinggal juga mempengaruhi kinerja pendidikan dasar dan menengah.

Pesatnya industri dan modernisasi bukan berarti bahwa tingkat pendidikanpun semakin tinggi, justru sebagian masyarakat di kabupaten pemalang lebih memilih dipabrik, sawah dan berwiraswasta bahkan memilih bekerja diluar kota daripada melanjutkan sekolah, sehingga bursa tenaga kerjapun menjadi murah sebagai konsekuensi dari rendahnya kualitas pendidikan mereka.

Pelaksanaan wajib belajar dan penanaman kesadaran pentingnya pendidikan (sekolah) belum begitu berhasil dikarenakan keadaan masyarakat dan sistem pendidikan yang ada. disini peran dinas pendidikan dan kebudayaan sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan yang ada didaerahnya. Dan tugas dinas pendidikan dn kebudayaan adalah merumuskan /merencanakan serta mengimplementasikan kurikulum pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Semua yang menjadi keputusan dinas pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan

kurikulum pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang akan terus berkembang dengan kebutuhan jaman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kekuatan, kelemahan dan ancaman bagi dinas P dan K dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar?
2. Isu-isu strategis apa saja yang dapat ditangkap oleh dinas P dan K dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar?
3. Faktor apa yang dapat diimplementasikan oleh dinas P dan K untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kualitas pendidikan.
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar.
3. Merumuskan strategi yang dipakai dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan masukan pada dinas P dan K dalam membuat strategi guna peningkatan kualitas pendidikan dasar.
2. Untuk mengetahui strategi apa saja yang diambil oleh dinas P dan K dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
3. Mendorong dinas P dan K dalam hal pembuatan dasar kurikulum yang sesuai.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu.

1. Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai dan norma tersebut serta mewariskan pada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Atau dengan kata lain pendidikan dapat diartikan sebagai peradaban bangsa yang dikembabangkan atas dasar pandangan hidup itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita

dan tujuan pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara, bangsanya berfikir dan berperilaku secara turun temurun hingga pada generasi berikutnya yang dalam perkembangan akan sampai pada tingkat peradaban yang maju.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil) akan mampu mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa kita sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, pembukaan UUD 1945. pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari faktor psikologi manusia, disamping faktor lingkungan sekitar maka proses pendidikan perlu atau wajib berpegang pada petunjuk-petunjuk dari para ahli psikologi pendidikan dan perkembangan, termasuk psikologi agama. Tanpa petunjuk psikologi agama, proses pendidikan tidak akan mengena pada sasarannya secara tepat guna. Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan ketaqwaan kepada Tuhan YME menjadi sumber motivasi yang utama. Ada beberapa definisi tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli :

1. Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 yang menyebutkan : Pendidikan umumnya merupakan

daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intelekt) dan tubuh anak ; dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan kehidupannya³

2. Driyarkara : Pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia muda.⁴ Pengangkatan manusia dalam taraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

Dari uraian pengertian pendidikan diatas dapat dikemukakan arti dari pendidikan yaitu sebagai berikut :

- Pendidikan adalah aktivitas dan usah manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (piker, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra serta ketrampilan-ketrampilan)
- Pendidikan berikut berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita/tujuan pendidikan, misi, sistem dan organisasi pendidikan.

Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

³ Prof. DR. H.A.R Tilaar, MSc "Manajemen Pendidikan Nasional", Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992

⁴ Ditjen Dikte 1983/ 1984 : 14

2. Pendidikan Dasar

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia no 28 tahun 1990 pasal 1 sebagai pelaksana UU no 2 tahun 1989 disebutkan : “pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat”.

Ciri-ciri esensi dari pendidikan dasar menurut tim pengerah dan tim materi peningkatan wawasan kependidikan guru menyabutkan⁵

Pertama : Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum.pendidikan umum (*General Education*) mengandung arti bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir-akhir pendidikan.

Kedua : Pendidikan dasar berlangsung selama sembilan tahun yaitu enam tahun ditngkat SD dan tiga tahun ditingkat SLTP atau yang sederajat. Hal ini tidak berarti pendidikan SD dan SLTP berada dalam satu atap, melainkan tetap terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar. Dengan pengertian ini, pendidikan dasar menunjuk pada bentuk satuan pendidikan seperti dikemukakan dalam PP No 28 tahun 1990.dengan adanya pendidikan dasar, SD dan SLTP tetap ada dan penyebutannya tidak

⁵ Tim dosen IKIP. Dasar-dasar kependidikan, IKIP Semarang press, emarang, 1990, hal.5

mengalami perubahan. *Ketiga* : Pendidikan dasar tidak bersifat inform, meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum, tidak semua peserta didik mendapatkan materi yang kurikulumnya sama seluruhnya, atau bersifat uniform melainkan dimungkinkan adanya perbedaan diluar materi muatan nasional yang berjumlah 42 jam setiap hari dan meliputi 13 bidang kajian, hal ini dijamin oleh UUSPN maupun UU No.28 tahun 1990.

Keempat : Pendidikan dasar dilakukan diluar sekolah dan luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan. *Kelima* : lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya, sehingga memberikan keleluasaan gerak bagi peserta didik. Hal ini dijamin dalam pasal 23 ayat (1) UUSPN "Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak pada peserta didik".

Setiap pemerintah selalu berusaha agar kebijaksanaannya selalu dipatuhi oleh rakyatnya. Banyak upaya yang sering ditempuh oleh pemerintah atau organisasi ini untuk membina kepatuhan tersebut. *Pertama* kebijakan ini bertumpu pada kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Asumsinya bila pendidikan dasar ini telah terpenuhi, kemungkinan besar akan mengurangi pertentangan atau konflik yang gawat. *Kedua*, ganjaran dan hukuman, cara ini adalah cara yang klasik yang sampai sekarang masih dipergunakan/ masih berlaku. Maksudnya ialah memanfaatkan atau "enforcemen" suatu kebijaksanaan dengan memberikan hukuman pada pilihan diluar kebijaksanaan dan memperoleh ganjaran seperti yang dituntut kebijaksanaan. *Ketiga*, membina kepatuhan yang berjangka

panjang atau menengah. Hal ini dilakukan dengan pendidikan dan sosialisasi politik kebijaksanaan pendidikan sehubungan dengan hal ini tentu saja berbeda dengan upaya pendidikan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan politik rakyat adalah upaya instrumental demi kepentingan politik yang berkuasa. Sedangkan pendidikan memenuhi masyarakat merupakan konsumsi umum, pada saat ini hampir semua pemerintah berkepentingan dengan pendidikan rakyatnya. Sampai dimana keterlibatan pemerintah dalam masalah pendidikan .

3. Manajemen Strategis

Setiap organisasi tanpa manajemen akan menjadi kacau. Hal ini terbukti dengan jelas dalam situasi tidak normal seperti adanya bencana, ketika organisasi sedang tidak teratur atau mengalami kemunduran didalam keadaan yang membahayakan organisasi tersebut, manajemen sangat dibutuhkan untuk membenahi organisasi agar menjadi lebih baik. Untuk itu organisasi membutuhkan manajemen yang mempunyai filosofi *total quality* yaitu filosofi bahwa seluruh anggota organisasi berusaha menerapkan semua konsep manajemen yang mengarah pada perbaikan terus menerus. Kegiatan organisasi dilaksanakan melalui kerja sama tim atau gotong royong dan tim tersebut harus memahami semua fungsi yang ada.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian manajemen, yaitu antara lain :

1. Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana

organisasi-organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan dan menjadikan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan.

Manajemen memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahu-tahun untuk menjadi serangkaian teori-teori.

2. T.H Nelson dan Prof. Oey Lian Lie, menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni , sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan setelah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas-seperti ilmu yang lain yang disebut "asas-asas manajemen". Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilan pemimpin dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman tentang pengalaman ilmu manajemen, kemampuan atasan mempengaruhi bawahan dengan wibawa, kebersamaan, atau seni memimpin organisasi dengan ilmu manajemen seorang pemimpin mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik dan dapat menentukan sikap dalam mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara cepat dan tepat.
3. James A. F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan oleh anggota organisasi serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik beberapa pokok pikiran penting sebagai berikut :

- Proses : Suatu cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin apapun kemampuan, keahlian, keterampilan terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- Perencanaan : Menunjukkan bahwa para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasar pada suatu cara rencana atau logika dan bukan asal tebak saja.
- Pengorganisasian : Ini berarti para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuan mengarahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Tentu saja dengan makin terpadu dan terarahkannya pekerjaan akan menghasilkan efektifitas organisasi. Disinilah tugas pemimpin untuk mengkoordinasi.
- Memimpin : Ini menunjukkan bagaimana para pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk tugas tertentu. Dengan menciptakan suasana yang tepat mereka membantu bawahannya bekerja secara baik.

- Pengawasan : Para pemimpin berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian organisasi menuju arah yang salah, para pemimpin berusaha mencari sebabnya yang kemudian mengarahkan kembali ke jalur yang benar.
- Menggunakan seluruh sumber daya organisasi : Pemimpin menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi, namun tanpa sumber daya yang lain maka penggunaan sumber daya manusia tidak akan optimal.
- Upaya mencapai tujuan : Pemimpin setiap organisasi berupaya untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan setiap organisasi berbeda-beda, tetapi apapun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen adalah proses terpenting untuk mencapai tujuan tersebut.

Manajemen strategis harus disusun secara konseptual, oleh sebab itu seorang penyusun strategi dituntut memiliki keahlian-keahlian sebagai penyusun strategi, keahlian itu antara lain :

- a. Identifikasi : Proses analisis yang cermat untuk menjamin bahwa semua faktor yang mempengaruhi strategi telah dipertimbangkan. Lebih penting lagi proses identifikasi menentukan parameter-parameter dalam menganalisis strategi harus dimulai.

- b. **Prediksi** : Masa depan tidak dapat diidentifikasi tetapi harus diprediksi. Prediksi tidak semata-mata didasarkan pada analisis obyektif tetapi juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan subyektif. Jika tidak terjadi perubahan lingkungan yang penting, maka pekerjaan menyusun strategi relatif sedikit. Tetapi karena sifat lingkungan yang dinamis khususnya dalam jangka panjang maka biasanya terjadi perubahan lingkungan yang penting dan pekerjaan penyusun strategi yang relatif banyak. Penyusun strategi harus memperoleh cara untuk menanggapi perubahan lingkungan dengan mengantisipasi perubahan tersebut. Antisipasi tersebut memerlukan pertimbangan terhadap ketidakpastian dan prediktif yang sulit.
- c. **Inovasi** : Dalam mengembangkan alternatif strategi, penyusun strategi harus memiliki keahlian berinovasi atau sebagai innovator. Dalam konteks lingkungan dan sumber-sumber perusahaan, penyusun strategi harus menyelidiki pilihan-pilihan strategi seluas-luasnya tetapi masih dalam kemampuan organisasi.
- d. **Evaluasi atau pengujian konsistensi** : Tidak hanya melibatkan instrumen logis tetapi dalam realitanya memerlukan juga analisis dan pertimbangan. Dalam kerangka kerja dinamis merumuskan strategi, evaluasi, mempertemukan tidak hanya lingkungan dan sumber-sumber saat sekarang tetapi juga memprediksi kondisi eksternal dan internal masa depan.

- e. Pembuatan keputusan ; Berhubungan dengan pemilihan strategi, alternatif strategi yang disusun dengan keahlian dan inovasi selanjutnya dievaluasi atau dituju konsistensinya agar dapat dibuat keputusan dalam pemilihan strategi. Disebabkan keputusan strategi biasanya melibatkan komitmen-komitmen utama yang dibuat dalam mengantisipasi kejadian-kejadian masa datang yang mengandung ketidakpastian, maka pembuatan keputusan bukanlah tujuan yang mudah bagi penyusun strategi, salah memilih berarti menuju kehancuran. Melakukan analisis SWOT dapat bermanfaat untuk memeriksa kemampuan, kelemahan dan mengetahui peluang serta ancaman pada sebuah organisasi.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT adalah :

Langkah pertama ; Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi.

Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada sebuah organisasi adalah penting karena bisa untku membetulkan, mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari organisasi.

Langkah kedua : mengidentifikasi peluang dan ancaman.

Peluang dan ancaman organisasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor ini harus diketahui oleh organisasi karena berpengaruh pada tujuan organisasi.

Langkah ketiga : Merumuskan tujuan organisasi.

Setiap organisasi harus punya tujuan yang ingin dicapai dan untuk mendapatkan tujuan itu disusun sebuah strategi. Dalam menyusun strategi itu

harus melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari organisasi agar tidak melenceng dari tujuan organisasi.

Langkah keempat : Merumuskan tujuan secara berkala.

Dalam mencapai tujuan harus membuat target waktu, karena lingkungan yang terus berubah maka strategi yang diterapkan hendaknya punya batasan waktu sehingga bila sewaktu-waktu strategi yang ada sudah tidak relevan maka dapat diganti dengan strategi lainnya.

Melaksanakan analisis SWOT bagi sebuah organisasi membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan hasil dari analisis itu adalah sebuah strategi yang realistis dan koheren yang dapat dijangkau oleh organisasi, dimana strategi yang diperoleh sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada sebuah organisasi.

Perencanaan strategi harus dapat mencatat implikasi khusus bagi perumusan isu strategi yang efektif serta tindakan yang mungkin diambil sebelum berakhirnya proses perencanaan strategis. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkadang merupakan cermin dari citra yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kekuatan terbesar organisasi bisa jadi merupakan kelemahan terbesar organisasi. Kiatnya adalah mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan kelemahan tanpa dirugikan oleh kelemahan dan ancaman terkait.

Mengenai spesifikasi masalah eksternal dan internal sebagai berikut :

Eksternal : Lingkungan yang ada diluar organisasi dan berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan.

kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat memberikan asumsi-asumsi, mendiagnosa masalah, penyebab-penyebab yang timbul, menetapkan tujuan-tujuan yang memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan rancangan-rancangan pokok kebijakan yang baru.

2. Strategi

Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian mengenai strategi

1. siasat perang
2. Ilmu-ilmu siasat.
3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus.⁸

Dalam kegiatan ekonomi, strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancng untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaa yang tepat oleh perusahaan.

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir⁹

3. Kualitas pendidikan dasar

Mengupayakan agar masyarakat lulusan pendidikan dasar mempunyai kecerdasan yang setara dengan kebutuhan pendidikan dasar yang ada sekarang.

⁸ Kamus besar bahasa indonesia, hal.859-860

harus melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari organisasi agar tidak melenceng dari tujuan organisasi.

Langkah keempat : Merumuskan tujuan secara berkala.

Dalam mencapai tujuan harus membuat target waktu, karena lingkungan yang terus berubah maka strategi yang diterapkan hendaknya punya batasan waktu sehingga bila sewaktu-waktu strategi yang ada sudah tidak relevan maka dapat diganti dengan strategi lainnya.

Melaksanakan analisis SWOT bagi sebuah organisasi membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan hasil dari analisis itu adalah sebuah strategi yang realistic dan koheren yang dapat dijangkau oleh organisasi, dimana strategi yang diperoleh sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada sebuah organisasi.

Perencanaan strategi harus dapat mencatat implikasi khusus bagi perumusan isu strategi yang efektif serta tindakan yang mungkin diambil sebelum berakhirnya proses perencanaan strategis. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkadang merupakan cermin dari citra yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kekuatan terbesar organisasi bisa jadi merupakan kelemahan terbesar organisasi. Kiatnya adalah mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan kelemahan tanpa dirugikan oleh kelemahan dan ancaman terkait.

Mengenai spesifikasi masalah eksternal dan internal sebagai berikut :

Eksternal : Lingkungan yang ada diluar organisasi dan berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan.

Lingkungan luar itu terdiri dari ideologi misal Pancasila; ekonomi misal kejadian resesi ketidakpastian, inflasi, tingkat bunga upah dan tingkat persaingan; lingkungan politik meliputi peraturan yang mempengaruhi perkembangan dan kesempatan kerja, hubungan kerja, lingkungan teknologi antara lain perkembangan komputer, nuklir; lingkungan sosial misal peran serta masyarakat.

Plum dan Delmont mengidentifikasi enam kategori yang termasuk lingkungan eksternal, yaitu :

1. Isu dan kecenderungan pada dana, bagaimana perolehan dan dalam pelaksanaan strategi yang sudah disusun dan akan direalisasikan pada konsumen.
2. Perubahan proses sosial dan politik, pengakuan dan perencanaan bagi konstitusi politik yang sedang muncul.
3. Kecenderungan komputasi, sistem komunikasi yang tinggi dimanfaatkan dalam merealisasikan strategi yang ada.
4. Peningkatan dalam beban tanggung jawab dan manajemen resiko, mengembangkan strategi untuk memperkecil tanggung jawab warga.
5. Perawatan kesehatan, mengadakan perjanjian sebagai pilihan terhadap ketentuan perawatan yang lebih baik untuk pegawai dan klien.
6. Isu-isu yang lain yang berkaitan dengan SDA dan SDM, bencana alam ataupun pengajuan pensiun dini.

Internal : Lingkungan yang ada dalam organisasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, aspek yang membantu atau merintangi pencapaian misi organisasi dan ini terdiri dari enam kategori.

1. Sumber daya/ input ; Seberapa besar SDA dan SDM yang dimiliki organisasi tersebut.
2. Strategi/proses : Seberapa besar kemampuan dan kemauan kinerja dari SDM yang ada pada organisasi itu.

Sebuah organisasi harus bisa melihat lingkungan internal dan eksternal yang dari kedua lingkungan itu dapat dilihat peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dari organisasi tersebut dan para staf harus bisa mengidentifikasi isu yang ada agar organisasi cepat tanggap dengan kejadian didalam ataupun diluar lingkungan organisasi.

Sebuah organisasi dapat mengembangkan lebih dari satu kebijakan dalam menangani hal penting yang terjadi dalam organisasi. Namun kebijakan tidak langsung memberi tahu manajer menangani suatu promosi tertentu atau cara menambahkan program tertentu. Kebijakan strategis merupakan pedoman untuk melaksanakan strategi yang ada, kebijakan strategis membatasi manajer dalam sebagian kasus tetapi tidak seluruhnya. Ia berfungsi sebagai pedoman bagi manajer tingkat menengah dan manajer penyelia (*supervisor*) dalam membuat pilihan tertentu.

Strategi kebijakan disusun untuk memastikan bahwa :

1. Keputusan strategis dilaksanakan
2. Terdapat suatu dasar pengendalian.

3. Waktu yang digunakan dalam mengambil keputusan hemat
4. Situasi yang sama ditangani dengan konsisten.
5. Koordinasi antar unit dapat terjadi kapan saja.⁶

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Yaitu merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berasal dari kata *Formulation* yang berarti perumusan. Perumusan dalam hal ini memproses segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pilihan-pilihan yang diolah oleh para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.

Menurut William N Dunn, formulasi kebijakan adalah :

“Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat pemerintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif”⁷.

Perumusan masalah dapat memberikan masukan-masukan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan

⁶ Lawrence R.J dan Wiliam”Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan”, Erlangga, hal.359

⁷ William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal.24

kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat memberikan asumsi-asumsi, mendiagnosa masalah, penyebab-penyebab yang timbul, menetapkan tujuan-tujuan yang memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan rancangan-rancangan pokok kebijakan yang baru.

2. Strategi

Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian mengenai strategi

1. siasat perang
2. Ilmu-ilmu siasat.
3. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sarana khusus.⁸

Dalam kegiatan ekonomi, strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancng untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaa yang tepat oleh perusahaan.

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir⁹

3. Kualitas pendidikan dasar

Mengupayakan agar masyarakat lulusan pendidikan dasar mempunyai kecerdasan yang setara dengan kebutuhan pendidikan dasar yang ada sekarang.

⁸ Kamus besar bahasa indonesia, hal.859-860

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Lingkungan internal.

Terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak yang meliputi sumber daya organisasi.

a. Sumber daya ; Berupaya serius untuk memaksimalkan kinerja para staf, pengontrolan keberadaan keuangan baik pemasukan ataupun pengeluaran agar ada pembukuan tentang keuangan yang rapi dengan begitu memudahkan pengontrolan anggaran, melaksanakan penyaringan informasi yang kontinue baik tentang dunia luar ataupun dalam organisasi agar tidak ketinggalan berita.

b. Proses kerja ; Sebuah organisasi dalam mencapai tujuan diperlukan langkah-langkah yang terarah, keseluruhan dari langkah itu disebut program. Adapun program kerja yang sudah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar adalah :

- Memperkecil frekuensi tinggal kelas.
- Penyebaran guru terdidik.
- Mengikutsertakan masyarakat dalam dunia pendidikan.

c. Kinerja dari program yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan dari apa yang telah dikerjakan pasti akan nampak hasil yang dicapai dan kegagalan yang ada. Hasilnya, pemerataan guru-guru terdidik sampai ke desa-desa, frekuensi tinggal kelas dapat

⁹ Ibid.hal12

diperkecil, peningkatan kualitas guru dan dampak kegagalan yang ada yaitu : kurang respon dari masyarakat terhadap dunia pendidikan.

2. Lingkungan Eksternal

Merupakan variabel peluang dan ancaman yang ada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan ini mempunyai dua bagian; (1).Lingkungan kerja : Terdiri dari elemen atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh operasi utama organisasi, (2).Lingkungan sosial : Terdiri dari kekuatan umum, kekuatan berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang.

- a. Politik : Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No.050/ 45/BPP tanggal 17 Februari 2005 tentang penyampaian rancangan awal RPJM Kabupaten Pemalang 2005-2010. keputusan ini dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.
- b. Ekonomi : Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif baik terlihat dari tingkat jua beli masyarakat yang terbilang tinggi.
- c. Sosial : Dengan warna daerah Jawa maka sifat gotong royong masih sangat kental terlihat, dengan jumlah penduduk sekitar 1.342.513 orang maka Pemalang termasuk daerah yang berpopulasi tinggi.
- d. Teknologi : Selain sekolah formal terdapat lembaga penunjang lain baik yang informal maupun yang formal (kursus-kursus).

- e. Mitra kerja : Menjalinkan kerjasama yang baik dengan klien maupun instansi terkait.
- f. Stake holders : Merupakan instansi atau perorangan yang berhubungan dengan organisasi tersebut.

3. Isu Strategis

merupakan variabel yang dijadikan sebagai gambaran ataupun pedoman oleh organisasi untuk merumuskan suatu strategi yang akan dibuat atau diambil.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang strategi dinas P dan K kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskripsi kualitatif. Metode penelitian deskripsi kualitatif merupakan metode penelitian yang memfokuskan pada penggambaran suatu keadaan, gejala atau fenomena sosial tertentu guna mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di kabupaten Pemalang dengan alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup padat yaitu mencapai 1.342.513 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Wilayah kabupaten Pemalang mempunyai kondisi yang bervariasi

yaitu meliputi wilayah daratan pantai yang tersebar disepanjang pantai utara, daerah perbukitan besar dan perbukitan kecil. Dengan ondisi tersebut, maka akan mengakibatkan munculnya kendala pada pertumbuhan pendidikan yang tida merata antar kecamatan di wilayah kabupaten Pemalang.

Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian khususnya mengenai masalah pendidikan dengan mengambil studi kasus pada dinas P dan K kabupaten Pemalang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk menunjang kegiatan penelitian tentang strategi dinas P dan K kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang diperlukan.

b. Interview (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dan lisan kepada setiap responden yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Biasanya berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden sehingga dapat

¹⁰ Laxy J Moloeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

memperoleh jawaban secara langsung dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen maupun gambar-gambar yang ada dilokasi penelitian. Data sekunder ini dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam menganalisa semua permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak yang terkait langsung dalam penelitian tersebut.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya data diperoleh dari catatan-catatan buku, dokumen-dokumen, gambar-gambar serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga pengolahan data dilakukan secara kualitatif pula.

Menurut Winamo Surachman, ciri-ciri dari metode deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yaitu pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kembali dokumen, catatan dan informasi yang diperoleh di lapangan baik yang menyangkut data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan jawaban dan informasi menurut jenisnya.
- c. Membuat kategori dengan beberapa tabel untuk mendeskripsikan data.